

STRATEGI MANAJEMEN KRISIS DARURAT SAMPAH DI KOTA BANDUNG TAHUN 2023 MELALUI KOLABORASI PENTAHHELIX

Roudlotul Jannah¹, Sarah Derma Ekaputri²

¹Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Telkom University, Indonesia
roudlotuljannah@student.telkomuniversity.ac.id

²Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Telkom University, Indonesia
sarahekaputri@telkomuniversity.ac.id

ABSTRACT

The waste crisis in Bandung City that has occurred in the past few years has become one thing that needs to be actively addressed. Alleviation of problems in waste management must be done carefully, collaboration is needed in its implementation. The division of roles and responsibilities is given to all levels of society to realize a beautiful and sustainable city of Bandung. The Pentahelix collaboration is one of the solutions in alleviating waste emergency problems. The purpose of this study is to find out what strategies are used by the Bandung government during the waste emergency crisis. And find out what efforts the Bandung government is making to alleviate the emergency waste crisis in 2023. The theory used in this study is Stakeholder Theory (Jones, Thomas M, 2018). This research uses a qualitative approach and case study method. Data collection was obtained through interviews with one key informant, one expert informant, and four supporting informants. The results showed that the Bandung City Government collaborated as an effort to alleviate the emergency waste crisis in 2023. Through their respective roles ranging from Academics (Drafters), Society (Accelerators), Government (Regulators), Media (Expanders). Several challenges have not become obstacles in the ongoing collaboration, as evidenced by the decrease in waste deposits to TPS.

Keywords : Crisis Management, Pentahelix Collaboration,, Waste Emergency,

ABSTRAK

Krisis sampah di Kota Bandung yang terjadi dalam beberapa tahun kebelakang menjadi satu hal yang perlu ditangani secara aktif. Pengentasan permasalahan dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara seksama, dibutuhkan kolaborasi dalam pelaksanaannya. Pembagian peran serta tanggung jawab diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan kota Bandung yang asri dan lestari. Kolaborasi Pentahelix menjadi salah satu solusi dalam pengentasan permasalahan darurat sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh pemerintah Bandung saat terjadi krisis darurat sampah. Dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Bandung untuk pengentasan krisis darurat sampah tahun 2023. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *Stakeholder Theory* (Jones, Thomas M, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data diperoleh melalui hasil wawancara dengan satu informan kunci, satu informan ahli, dan empat informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung melakukan kolaborasi sebagai bentuk upaya dalam pengentasan krisis darurat sampah tahun 2023. Melalui peranannya masing-masing mulai dari Akademisi (Konseptor), Masyarakat (Akselerator), Pemerintah (Regulator), Media (Expander). Beberapa tantangan tidak menjadi penghambat dalam berlangsungnya kolaborasi, dengan dibuktikan telah menurunnya setoran sampah ke TPS.

Kata Kunci : Darurat Sampah, Kolaborasi Pentahelix, Manajemen Krisis

I. PENDAHULUAN

Krisis sampah hal yang seringkali menjadi masalah tahunan bagi Kota Bandung. Kota Bandung menjadi salah satu penyumbang sampah terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari Open Data Jawa Barat (2022), jumlah sampah yang dihasilkan Kota Bandung mencapai 1.530 ton per hari. Sampah makanan menjadi penyumbang terbesar yaitu sebesar 709,73 ton per hari. Jumlah produksi sampah di Kota

Bandung di tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilansir dari data Badan Pusat Statistika jumlah produksi pada tahun 2021 mencapai 1.430 ton per hari. Menurut data portal bandungkota.bps.go.id (2023) secara administratif luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luas ini didasarkan pada peraturan Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 tahun 1989 dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.469.589 jiwa dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.242.674 jiwa dan perempuan sebanyak 1.226.915 jiwa. Tidak dipungkiri bahwa hal tersebut yang mengakibatkan produksi sampah di wilayah Kota Bandung tergolong tinggi.

Faktor krisis darurat sampah di Kota Bandung selalu terjadi karena terkendala oleh tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Hingga kini tempat pembuangan sampah yang tersebar di Kota Bandung masih menggunung. Hal ini dikarenakan terdapat kendala akibat kebakaran yang terjadi pada TPA Sarimukti. Pasca kebakaran pada TPA Sarimukti berimbas penutupan TPS di beberapa tempat di Kota Bandung. Di lansir dari detik.com (2023) ada sebanyak 188 truk sampah yang tidak bisa dialokasikan ke tempat pembuangan sampah. Akibatnya ini berdampak pada ritase pembuangan sampah Kota Bandung. Beberapa tempat pembuangan sampah yang tersebar di Kota Bandung masih menggunung. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat kendala akibat kebakaran yang terjadi pada TPA Sarimukti.

Pasca kebakaran pada TPA Sarimukti berimbas penutupan TPS di beberapa tempat di Kota Bandung. Di lansir dari detik.com (2023) ada sebanyak 188 truk sampah yang tidak bisa dialokasikan ke tempat pembuangan sampah. Akibatnya ini berdampak pada ritase pembuangan sampah Kota Bandung yang mencapai 1.600 ton per hari. Data diatas menunjukkan bahwa Kota Bandung menyalah sebanyak 63-73 persen sampah ke TPA Sarimukti, hal ini sudah melebihi batas kuota sampah yang telah ditetapkan.

Menurut data *pra-riiset* oleh Luthfi Budiman selaku Analisis Lingkungan Hidup DLH Bandung, berimbasnya pasca kebakaran TPA Sarimukti, tidak ada alternatif lain selain Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta pengelolaan bank sampah tidak mencukupi pengurangan sampah yang akan dibuang ke TPA Sarimukti. Jika pembuangan sampah dilakukan dengan cara memilah antara sampah organik dan anorganik digencarkan, krisis atau darurat sampah ini sudah tidak akan terjadi berulang-ulang di kota yang mengklaim smart city ini.

Pemerintah Kota Bandung perlu menegaskan kepada masyarakat agar dapat memilah sampah secara mandiri, dengan memaksimalkan TPS terpilah. Dilansir dari bandungbergerak.id (2023) dilakukannya TPS Terpilah ini adalah untuk menerima sampah yang sudah terpilah oleh produsen sampah, yaitu sampah dari masyarakat, instansi pemerintah, maupun swasta. Tanggung jawab terkait pemilahan sampah ini perlu diterapkan diseluruh kewilayahan Kota Bandung, karena itu diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka bersedia untuk mengelola sampah organik dimulai dari rumah masing-masing.

Pemerintah Kota Bandung mengambil tindakan tegas atas masalah lingkungan tersebut dengan menetapkan status Darurat Sampah yang dimulai pada 24 Agustus 2023 yang tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 658/Kep.579- DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya. Penanganan sampah ini harus dibenahi secara menyeluruh dan teratur agar dapat bermanfaat untuk ekonomi, kesehatan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, karena pengelolaan sampah bukan hanya kewenangan aparat pemerintah saja, tetapi masyarakat dan *stakeholder* harus turut andil dalam pembebasan dan pengelolaan sampah, khususnya untuk masyarakat Kota Bandung. Solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait mengatasi sampah sudah lama ada, yaitu perlunya pemilahan sampah organik dan non-organik. Namun solusi tersebut kurang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung, sehingga masyarakat masih kurang adanya kesadaran bahwa sampah yang dibuang tidak terpikir bagaimana dan seperti apa sampah tersebut setelahnya. Pengelolaan sampah perlu adanya tekad yang kuat dalam diri agar dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan juga mengubah perilaku masyarakat karena permasalahan sampah bukan hanya masalah nasional tetapi juga masalah daerah.

Hingga saat ini Kota Bandung masih berstatus darurat sampah sampai akhir tahun 2023, berbagai upaya Pemerintah Kota Bandung telah dijalankan untuk mengurangi sampah. Penanganan sampah ini tidak bisa berjalan jika hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja. Dalam pernyataan pada *release* Humas Bandung, Ketua Harian Darurat Sampah Ema Sumarna (2023) berpendapat penanganan sampah tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung saja. Sejalan dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi penanggung jawab untuk

mengkoordinasikan pengelolaan sampah sampai dengan periode Status Darurat Sampah Raya diberlakukan (Reni S, 2023). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, media, pengusaha hingga akademisi. Oleh karena itu, berharap seluruh elemen tersebut memiliki peran dan berkontribusi dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung tersebut juga harus sejalan dengan pemahaman serta kemauan masyarakat. Pengolahan sampah akan menjadi mudah jika masyarakat juga ikut andil dan paham cara

memilah sampah dan menyelesaikan sampah rumah tangga.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Saepudin & Hadi Kushendar, 2021) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung” peneliti melihat bahwa inovasi dari gerakan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Memanfaatkan sampah) ini terdapat masalah dalam pengimplementasiannya yaitu, masyarakat masih kurang *awareness* akan pentingnya memilah sampah, terdapat gap yang besar dalam jumlah sampah di TPS Babakan Sari dan TPS Tegallega, biaya pengelolaan yang kurang efisien. Apabila masyarakat gerak secara masif untuk melek dengan persoalan sampah akan menjadi dampak besar untuk memberantas penumpukan sampah. Dalam berbagai macam kegiatan seperti sosialisasi, talkshow menjadikan topik sampah sebagai hal penting untuk diperangi. Permasalahan lingkungan ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan manajemen publik sehingga tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah saja. Dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia, badan-badan pemerintah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diatur dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Badan-badan tersebut bekerja dengan tujuan menciptakan kondisi kehidupan yang baik bagi masyarakat. Secara umum, kebijakan pemerintah, sesuai dengan pandangan Thomas R. Dye dalam (Zitri et al., 2022), mencakup segala hal yang diinstruksikan atau tidak diinstruksikan oleh pemerintah. Definisi ini mendasarkan pada fakta bahwa pemerintah harus mengatasi berbagai masalah dan memenuhi berbagai keinginan serta kebutuhan masyarakat.

Kegiatan komunikasi yang terorganisir tentunya bertujuan untuk menciptakan dampak yang baik yang dituju untuk khalayak khusus secara berkelanjutan. Strategi sendiri mempunyai arti perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) yang mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah pencapaian (Komang Agus W. I, 2019). Penelitian Effendy (2000) dalam (Komang Agus W. I, 2019) untuk mencapai tujuan strategi komunikasi *public relations* tentunya harus membuat taktik operasional, dalam kata lain bahwa pendekatan yang dilakukan bisa saja berbeda sewaktu-waktu melihat dari situasi dan kondisi. Perusahaan harus menyadari bahwa keterlibatan *stakeholder* adalah faktor utama dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk keberlanjutan dari program yang dijalankan, karena dalam pelaksanaannya tidak hanya fokus pada hasil yang akan dicapai, namun proses harus juga diperhatikan guna mencapai tujuan yang diinginkan (Daffa et al., 2023). Hasil yang diperoleh dari pemberdayaan masyarakat memberikan dampak manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan terkait fasilitas kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan swasta dalam pengelolaan sampah, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini harus dibenahi secara menyeluruh dan teratur agar dapat bermanfaat untuk ekonomi, kesehatan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, karena pengelolaan sampah bukan hanya kewenangan aparat pemerintah saja, tetapi masyarakat harus turut andil dalam pembebasan dan pengelolaan sampah, khususnya untuk masyarakat Kota Bandung. Menurut Nawawi dalam (Dr.Drs Choirul Saleh, t.t., 2020) kolaborasi adalah sebagai upaya dalam mencapai sebuah tujuan bersama yang sesuai dengan tugasnya. Pembagian tugas tersebut dinilai sebagai satu kesatuan kerja yang mempunyai arah yang terarah pada pencapaian tujuan yang disepakati bersama. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan berbagai *stakeholder* menjadi suatu jalan yang bisa digunakan untuk mengentaskan permasalahan darurat sampah tahun 2023.

Sebagaimana penelitian terdahulu oleh Ahmad.T Yazied, 2020 dalam judul “Perspektif Kolaborasi Pentahelix ABCGM Pada Program Kang Pisman Dalam Mengentaskan Permasalahan Pengelolaan Sampah” menyatakan bahwa komunikasi yang terjalin serta kolaborasi penting dilakukan dalam pengolahan dan pengentasan masalah sampah, dijelaskan pada konsep ekosentrisme dimana manusia memiliki peranan sebagai pejuang untuk keseimbangan lingkungan. Membangun kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah bukanlah hal yang mudah, kesadaran tersebut perlu kerjasama dari semua pihak. Dasar perlu dilakukannya strategi komunikasi adalah hal yang utama. Dengan adanya komunikasi sebagai sarana untuk menghubungkan pesan informasi antara komunikator dengan komunikan agar efektif dalam proses komunikasi.

Upaya dalam pengentasan darurat sampah Kota Bandung 2023 tidak luput dari aktivitas gebrakan yang terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, yakni menerapkan kolaborasi pentahelix. Kolaborasi Pentahelix di dalamnya terdapat lima pihak penting dalam mengatasi masalah lingkungan terkait sampah yaitu *Academic, Business, Government, Community dan Media*. Kolaborasi dengan beberapa stakeholder adalah salah satu aspek penting untuk mempengaruhi kualitas dan efektifitas dari pelaksanaan program. Menurut Kinanthi (2017) dalam (Dachi & Djakman, 2020), pengelolaan hubungan dengan stakeholder merupakan hal penting yang harus dioptimalkan agar tercipta hubungan harmonis yang menunjang tercapai tujuan perusahaan. Kolaborasi pentahelix yang dijalin mempunyai kontribusi masing-masing dalam upaya pengelolaan darurat sampah 2023 yang terjadi di Kota Bandung, seperti peran publikasi, penanaman materi kepada masyarakat, serta inovasi lainnya.

Penelitian ini menggambarkan pentingnya identifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, perusahaan pengelola sampah, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan media massa,

serta pengakuan akan peran masing-masing dalam penanganan krisis sampah. Dapat dilihat mengenai penjelasan diatas, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai strategi yang digunakan Pemkot Bandung melalui peran DLH Bandung sebagai penanggung jawab dalam penanganan manajemen krisis darurat sampah di Kota Bandung melalui perspektif kolaborasi pentahelix, melalui penelitian berjudul Strategi Manajemen Krisis Darurat Sampah Kota Bandung Melalui Kolaborasi Pentahelix.

II TINJAUAN LITERATUR

2.1 Manajemen Krisis

Penyelesaian krisis dalam sebuah organisasi atau komunitas dibutuhkan segala bentuk perhitungan yang tepat agar penyelesaian masalah tidak menimbulkan kekacauan yang baru. Dengan menggunakan strategi manajemen krisis yang tepat dan didasarkan atas identifikasi dan analisis situasi, organisasi akan dapat perlahan mengembalikan reputasi dengan perlahan (Made Widya, 2017). Menurut Iriantara (2004) manajemen krisis diartikan sebagai salah satu bentuk respon terhadap respon manajemen dari perubahan yang dialami oleh perusahaan. Manajemen bertanggung jawab atas pemecahan suatu masalah dari krisis dengan menggunakan strategi manajemen krisis yang mungkin dilakukan.

Manajemen krisis merupakan pengelolaan krisis yang memiliki tujuan pada strategi yang dibentuk dalam merespon saat terjadi krisis, dengan menggunakan panduan serta prosedur yang formal. Organisasi harus memiliki tim manajemen krisis dalam penanganan krisis untuk melakukan analisis krisis mulai dari tahap perencanaan dengan cara mengimplementasi strategi yang telah dirancang.

2.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Salah satu hal terkait penanganan darurat sampah yakni peran keterlibatan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) merupakan yang harus disiapkan dengan sempurna karena nantinya akan menentukan berjalan atau tidaknya tujuan yang diharapkan. Dengan hal ini teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) menentukan keberlanjutan suatu organisasi yang ditentukan oleh dukungan para *stakeholder* (Oktavianawati & Fajarrini Sri, 2018). Pemangku kepentingan memungkinkan dilibatkan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang akan menentukan keberhasilan maupun kegagalan dari suatu tujuan yang akan dilaksanakan.

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) mencakup bahwa sebuah organisasi perlu memperhatikan berbagai pihak yang terlibat (*Stakeholder*) dan keputusan perusahaan. Pihak-pihak yang dimaksud ini meliputi pemegang saham, karyawan, masyarakat, serta pihak lainnya yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan organisasi (Oktavianawati & Fajarrini Sri, 2018). Menurut Harrison, J. S., & Wicks, A. C. 2013 dalam Jones, Thomas M (2018) teori ini menekankan bahwa pentingnya kolaborasi dengan berbagai sektor yang diharapkan dapat menciptakan hubungan yang seimbang dan berkelanjutan dengan semua pihak yang terkait, sehingga dapat mencapai solusi yang holistik dan berkelanjutan dapat dihasilkan. Keterlibatan pemangku kepentingan ini diharapkan akan mengakomodir nilai dan kepentingan publik meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menghindari konflik.

Teori ini membantu menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memahami, merancang, dan melaksanakan terkait strategi manajemen krisis darurat sampah di Kota Bandung. Hal ini juga menjadi responsivitas untuk dapat merespon harapan serta kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam darurat sampah ini. Keterlibatan pemangku kepentingan ini akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat dalam penanganan darurat sampah. Teori Pemangku Kepentingan ini menjadi landasan yang kuat dalam merancang strategi manajemen krisis darurat sampah Kota Bandung 2023.

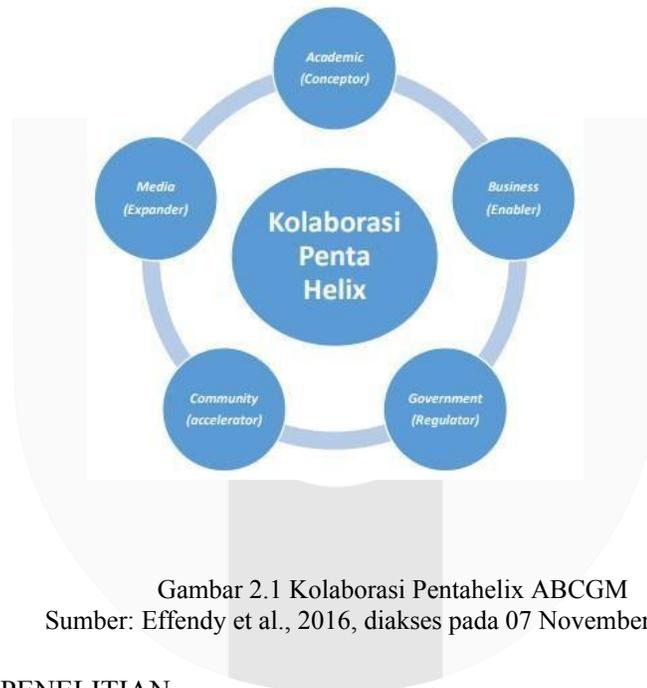
2.3 Konsep Penta Helix

Konsep Pentahelix merupakan pengembangan dari dua konsep sebelumnya, yakni triple helix yang kemudian dikembangkan lagi menjadi quadro helix yang mempunyai empat elemen yang mempunyai peran masing-masing yakni pemerintah, pengusaha, akademisi, serta masyarakat madani berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. empat elemen ini kemudian disempurnakan dengan menambahkan satu elemen yakni media massa. Lima elemen ini bernama Pentahelix ABCGM.

Pentahelix adalah sekelompok pemangku kepentingan untuk menjaga suatu program dapat berjalan dengan seimbang. Pemangku kepentingan atau *stakeholder* ini dapat menjadi sebuah rencana yang besar sebagaimana program itu dikembangkan. Meski terlihat sederhana, Pentahelix menjelaskan secara kompleks dengan cepat dan memungkinkan *stakeholder* memahami bahwa penting di dalam suatu program penanganan sosial dan lingkungan adanya kerja sama antara satu sama lain. Konsep Pentahelix ini digunakan sebagai proses penyelesaian masalah multipihak dengan

melibatkan beberapa stakeholder (Lindmark A. Struresson, E & Nilsson Roos, 2009).

Penggunaan konsep pentahelix dalam penanganan darurat sampah dapat menjadi solusi bagi semua sektor melalui sinergi serta dukungan yang diberikan. Akademisi (*Academician*) mengambil peran sebagai sumber pengetahuan dasar atau sebagai konseptor. Bisnis (*Business*) memiliki peran sebagai potensi untuk melanjutkan upaya mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Masyarakat (*Community*) juga berperan penting sebagai akselerator, masyarakat juga turut serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan penanganan masalah lingkungan. Pemerintah (*Government*) memiliki wewenang untuk mengatur serta mengontrol masyarakat dan institusi dengan membuat peraturan. Media massa (*Media*) berperan untuk menyebarkan informasi serta monitoring dengan perkembangan upaya penanganan masalah lingkungan.



Gambar 2.1 Kolaborasi Pentahelix ABCGM
Sumber: Effendy et al., 2016, diakses pada 07 November 2023

III METODOLOGI PENELITIAN

Terkait penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena dengan pendekatan kualitatif dapat menjelaskan pemahaman terhadap suatu fenomena. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif melibatkan peneliti sebagai instrumen utama, fokus pada penelitian objek alamiah, menerapkan teknik triangulasi, dan bersifat induktif untuk menghasilkan deskripsi mendalam dari fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif (Sugiyono, 2017). Creswell mengungkapkan bahwa, studi kasus adalah sebuah strategi dalam penelitian untuk mengungkapkan suatu kejadian yang mendalam dengan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai rangkaian prosedur dalam pengumpulan data. Sedangkan Azwar, menyatakan bahwa metode studi kasus merupakan cara yang digunakan dalam penelitian dengan mendapatkan informasi dan gambaran terkait subjek yang akan diteliti baik terkait informasi yang luas atau hal yang tertentu.

Metode studi kasus digunakan untuk melihat secara mendalam mengeksplorasi bagaimana pemerintah membangun kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* melalui model pentahelix. Metode studi kasus merupakan pendekatan kualitatif, dipilih untuk menyelidiki fenomena tersebut dengan penekanan pada aspek tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (dalam Yusri, 2014). Sehingga melalui metode studi kasus, peneliti mendapatkan informasi dan data secara rinci dan mendalam melalui informasi sumber yang diberikan oleh subjek yang dipilih oleh peneliti yaitu meneliti strategi manajemen krisis darurat sampah Kota Bandung 2023.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

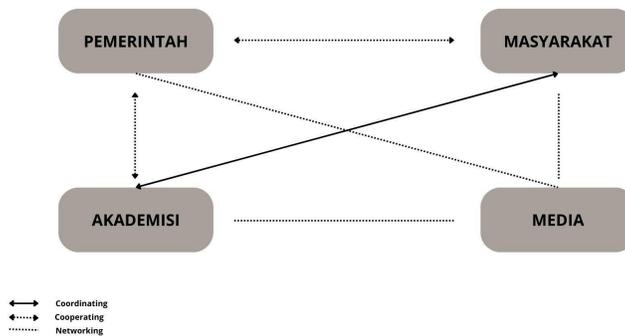
Sejatinya Kota Bandung sudah mengalami perjalanan panjang dalam pengelolaan sampah. Pada tahun 2018-2020, Pemerintah Kota Bandung membuat program Kang Pisman, program yang

dilakukan dengan cara mengurangi sampah, memisahkan sampah sesuai jenis dan memanfaatkan sampah sebelum dibuang ke tempat akhir pembuangan sampah. Namun sayangnya program ini masih dianggap sepele oleh sebagian orang. Hingga pada saat terjadi krisis kebakaran TPS Sarimukti yang menyebabkan tempat pembuangan akhir sampah mengalami kendala, yang mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai titik di Kota Bandung. Jika masyarakat tidak sadar akan kondisi gaya hidup yang mewajarkan membuang sampah adalah hal yang biasa dan mudah, maka kondisi penimbunan sampah akan semakin banyak. Sedangkan dilihat bahwa kapasitas pada setiap TPA sendiri memiliki batasan maksimal untuk menampung sampah secara keseluruhan. Rencana awal seharusnya yang bisa ditampung pada TPA Sarimukti berjumlah 2000 ton/hari, faktanya angka sampah terus meningkat hingga 4000 ton/harinya. Kejadian terbakarnya TPA Sarimukti juga menyebabkan penumpukan sampah yang tidak bisa dikendalikan, terutama Kota Bandung menyumbang sampah sekitar 70% ke TPA Sarimukti.

Melalui kolaborasi pentahelix ini memungkinkan individu atau kelompok mencapai tujuan bersama dalam pemberantasan masalah sampah. Pentahelix dapat menjadi jembatan dalam membuka dan menjelaskan kompleksitas sosial secara bersamaan dan memungkinkan *stakeholder* untuk dapat memahami pentingnya kerja sama. Kolaborasi dengan seluruh pihak dari semua elemen yang bekerja menjadi hal yang perlu dilakukan, dikarenakan pada pengelolaan sampah memerlukan aksi dari tiap-tiap peran. Kolaborasi Pentahelix ABCGM telah dilakukan seluruh upaya untuk diinternalisasi pada masa kedaruratan sampah Kota Bandung, akan tetapi dalam berjalannya masih memiliki hambatan yang perlu dihadapi dan dibenahi agar semua pihak yang terlibat sadar akan permasalahan sampah ini dan kolaborasi bisa berjalan secara berkelanjutan.

Menurut Cangara (2012) ada beberapa hambatan atau gangguan dalam komunikasi, yakni salah satunya adalah rintangan kerangka berpikir. Menyebutkan bahwa rintangan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang disampaikan. Berarti bahwa setiap pihak yang berperan dalam kolaborasi harus saling terbuka untuk mengurangi hambatan tersebut, dengan memberikan ruang untuk semua pihak dapat menghargai satu sama lain. Penelitian menemukan adanya rintangan berpikir, dimana keterlibatan pihak industri (*bussines*) dalam kolaborasi masih kurang. Kurangnya kesadaran dan komunikasi menjadi rintangan, hal ini tentunya bisa menjadi kurang efektif dalam menjalankan setiap partisipasi untuk menuntaskan permasalahan sampah ini.

Setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian darurat sampah harus terus berupaya untuk menghadapi faktor penghambat kolaborasi. Selanjutnya secara bersama-sama mendukung berjalannya program dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Upaya yang bisa dihadapi agar kolaborasi berjalan lancar adalah setiap individu yang terlibat harus mempunyai kesadaran diri, memiliki motivasi dalam pengentasan masalah darurat sampah, saling percaya dengan pihak yang berkolaborasi, dan terus berkoordinasi.



Gambar 4.6 Keterlibatan antar Stakeholder pentahelix
 Sumber: Olahan peneliti (2024)

Temuan yang peneliti dapat, bahwa kolaborasi pentahelix pada penanganan darurat sampah tahun 2023 berbeda dengan penjelasan diatas, bahwasanya dijelaskan kolaborasi ini terjalin dengan berbagai pola komunikasi. Kolaborasi Pentahelix dalam pengentasan krisis darurat sampah Kota Bandung 2023 ini dihubungkan dalam bentuk 3 pola hubungan yaitu *networking*, *coordinating*, dan

cooperating. Ketiga pola hubungan tersebut yang menjadikan berjalannya kolaborasi menjadi jelas dan transparan dalam menjalankan peran dan tugasnya. Akademisi sebagai konseptor yakni sebagai hubungan *coordinating* dengan komunitas. Dalam hal ini artinya saling berbagi informasi misalnya sebagai penyedia fasilitas dan fasilitator untuk pelatihan atau penelitian. Untuk hubungan antara akademisi dan pemerintah termasuk kedalam hubungan *cooperating* yang berarti terjalin secara formal dengan adanya komitmen. Saling berbagi sumber daya sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan program. Sedangkan hubungan akademisi dengan media termasuk *networking*, karena hubungan ini terjalin secara informal artinya tidak langsung

Hubungan antara masyarakat dan media termasuk ke dalam *networking*, artinya masyarakat berperan untuk membantu proses publikasi yang dihasilkan oleh para media. Setiap publikasi dari media merupakan suatu bentuk motivasi dalam mendukung program-program dari pemerintah agar seluruh lapisan masyarakat terlibat aktif dalam pengentasan Darurat Sampah ini. Sedangkan hubungan antar pemerintah dengan masyarakat adalah *cooperating*. Keduanya memiliki komitmen untuk memberikan beberapa fasilitas, pelatihan, dan lain sebagainya. Pemerintah dengan media yakni sebagai *networking*, hubungan keduanya sekedar saling berbagi sumber daya informasi yang diperlukan. Hal ini dikarenakan pemerintah sendiri mempunyai saluran informasi sendiri untuk publikasi. *Networking* dengan media lain menjadi pelengkap dan berfungsi agar informasi terkait program-program pemerintah lebih cepat sampai kepada khalayak.

Keterbukaan adalah kunci dalam keberhasilan suatu kolaborasi yang melahirkan inovasi serta solusi. Keberagaman pihak yang terlibat dalam darurat sampah ini diyakini memiliki cara pandang yang beragam. Keterbukaan menjadi hal yang harus dilakukan agar setiap tahapan atau proses yang dikerjakan dalam berjalannya program dapat diketahui bersama-sama meskipun sekecil apapun perkembangannya.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan serta temuan mengenai strategi manajemen krisis darurat sampah melalui kolaborasi Pentahelix dalam mengentaskan masalah sampah di Kota Bandung, peneliti menarik kesimpulan, yaitu:

1. Salah satu strategi yang diterapkan oleh DLHK dalam penanganan krisis darurat sampah dilakukan kolaborasi dalam perubahan pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Sebagaimana dijelaskan dalam teori stakeholder, bahwa keterlibatan semua pihak perlu diikutsertakan dalam peranannya masing-masing. Pemerintah sudah melakukan berbagai strategi mulai dari mengeluarkan SK Darurat Sampah, membuat aplikasi BWM, Kang Empos, dan Kang Pisman. Dengan keterlibatan dan komitmen para pemangku kepentingan lainnya mulai dari, akademisi, masyarakat, pemerintah, media akan memudahkan tujuan dan keinginan tercapai, yaitu mengentaskan permasalahan krisis darurat sampah Kota Bandung di tahun 2023.
2. Dalam upaya penanganan krisis sampah di Kota Bandung ini, kolaborasi menjadi satu hal yang tepat. Proses kolaborasi yang dihadapi kepada seluruh pihak yang tergabung dalam pengentasan krisis darurat sampah telah dilakukan upaya untuk mencari solusi melalui kolaborasi pentahelix. Akademisi sendiri memiliki peran melakukan edukasi serta sosialisasi kepada seluruh pihak yang ada di sekolah, pemerintah berperan mengeluarkan seluruh kebijakan-kebijakan ataupun program-program untuk mengatasi permasalahan sampah, masyarakat sendiri berperan ikut serta dan menjalankan seluruh perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta media bertugas menyebarluaskan informasi-informasi dari darurat sampah.

Saran

5.1.1 Saran Akademis

Penelitian ini adalah membahas tentang strategi manajemen krisis darurat sampah Kota Bandung Tahun 2023 melalui kolaborasi pentahelix berdasarkan Teori Stakeholder. Saran peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah untuk dapat meneliti pengaruh keberhasilan kolaborasi pentahelix dalam pengentasan krisis darurat sampah dengan menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk dapat dikembangkan oleh penelitian sejenis lainnya.

5.1.2 Saran Praktis

- a. Melakukan riset secara komprehensif dari setiap aspek nya dalam kolaborasi pentahelix. Mengingat permasalahan dalam pengolahan sampah merupakan masalah yang kompleks.
- b. Penulis juga menyarankan untuk menjaga komunikasi kepada seluruh pihak yang terlibat, agar

permasalahan sampah ini bisa teratasi dengan maksimal

REFERENSI

- Adityo Nugroho. (2017). Komunitas Muda Urban Mengelola Sampah: Kajian Partisipatoris Gerakan Peduli Sampah Nasional di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4.
- Ahmad.T Yazied. (2020). Perspektif Kolaborasi Penta Helix Abcgm Pada Program Kangpisman Dalam Mengentaskan Permasalahan Pengelolaan Sampah (Studi Fenomenologi di Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung). *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Arfani, M. (2022). Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(01), 104–120. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i1.497>
- Aurelia Anindya. (2023, Mei 12). *Persoalan Sampah yang Menjerat Kota Bandung*. Detik.com. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6715097/persoalan-sampah-yang-menjerat-kota-bandung>
- Ayub Ilfandi Imran. (2017). Komunikasi Krisis. Yogyakarta: Deepublish.
- Brilyana Yayan. (2023, Oktober 13). *Ini Serangkaian Upaya Kota Bandung Kurangi Sampah Sampai 70 Persen*. Bandung.go.id. <https://www.bandung.go.id/news/read/8581/ini-serangkaian-upaya-kota-bandung-kurangi-sampah-sampai-70-persen>
- Cutlip. S. M., A. H. Center and G. M. Broom, (2011). *Effective Public Relations* 9th ed. Jakarta Kencana Prenada Media Group
- Creswell, John W, 2014, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Dachi, C. S., & Djakman, C. D. (2020). Penerapan Stakeholder Engagement dalam Corporate Social Responsibility: Studi Kasus Pada Rumah Sakit Mata X. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 291–306. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.21535>
- Diniati & Rachman. 2022. *Strategi Kampanye Public Relations Indonesia Stock Exchange Dalam Program Yuk Nabung Saham*. Telkom University
- Lindmark. A. Struresson. E. & Nilsson-Roos, M. (2009). Difficulties of Collaboration for Innovation A study in the Öresund Region 1-236. <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1437850>
- Maharesti, W. S. (2018). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kinerja Lingkungan dan Liputan Media Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Yogyakarta. *jurnal Universitas Islam Indonesia*.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Kelompok Intrans Publishing.
- Riani, E., & Cordova, MR (2018). Kualitas dan kuantitas sampah dari kegiatan domestik di Das Citarum. Prosiding Seminar Nasional Darurat Sampah
- Umiyati, S., & Husni Tamrin, M. (2021). *Penta Helix Synergy in Halal Tourism Development*.
- Zitri, I., Lestana, Y., & Umami, R. (2022). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix The Zero Waste System Waste Management Policy Innovation in West Nusa Tenggara the Pentahelix. Model. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 107–119. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1>